

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arief Barda, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Effendi Jonaedi, Riyadi Prasitejo, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta.
- Fajar Mukti, Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hadjon Phillipus M., 1987, *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Hatta. Moh, 2008, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Galang Press, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty, Yogyakarta.
- Henny Nureaeny, 2011, *Tindak Pidana perdagangan Orang*, sinar Grafika, Jakarta.
- Hirschi Travis, 1969, *Causes of Delinquency*, University of California Press, Berkeley, California.
- Kerlinger, 1996, *Asas-asas Penelitian Behaviorial*, diterjemahkan Landung R. Simatupang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mertokusumo Sudikno, Pitlo. A, 1993, *Bab-bab tentang penemuan hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *"Metode Penelitian hukum"*, Mataram.
- Prakoso, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Rahardjo Satjipro, 2002, *Polisi Mandiri*, Jakarta.
- _____, 2006, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan Rakyat*, Jakarta.

- Rasjidi Lili, Putra I.B Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1983, “*Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*”, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, “*Hukum : Paradigma, metode dan dinamika masalahnya*”, Elsa and human, Jakarta.
- Sumardjono Maria SW., 2021, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Zehr Howard, 2015, *The Little Book of Restorative Justice*, 2nd Edition, Good Books, Intercourse, Pennsylvania.

B. Artikel Jurnal

- Angelique Claire, *et al*, “*Toward a New Methodology for Legal Research in Criminal Justice*”, *Journal of Criminal Justice Education* Volume 21, 2010.
- Aswandi, Bobi, “*Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1 No. (1), 2019.
- Eddyono Sri Wiyanti, “*Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*” International Organization for Migration (IOM) Indonesia, 2020.
- Hidayat Eko, “*Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Indonesia*” *jurnal hukum Lampung*, 2018.
- Novianti, “*Tinjauan Yuridis Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*”, *Jurnal Ilmu Hukum* 59
- Rambu.AS.M Maramba dan Rambu H. Indah, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Kasus Di Kabupaten Sumba Barat Daya-NTT)*, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 2 No.8, hlm.609, 2024
- Septiadi, Brian, “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) di Indonesia*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1 Nomor 3 tahun 2019.

- Simanjuntak Yoan, “*Perspektif HAM terhadap Upaya dalam Pemberantasan Perdagangan Orang dalam UU TPPO*”, *Jurnal Dinamika HAM*, Volume.7, No, 2007.
- Soraya Anurga, Sunardi Purwanda, Muhammad Taufik, “Perbandingan Pengaturan Hukum dalam KUHP Lama dan Baru Bagi Anak Korban Perdagangan Orang”, *Jurnal dinamika hukum* Volume 24 No.2, 2023
- Sunggara *et al*, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, Volume 2, Nomor 2, 2022.
- Supriyanto, Bambang Heri, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol. 2 No. (3), 2014.
- Sutra, Dianor “Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama: Studi Identifikasi Sidik Jari dalam Kasus Pidana”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 1 No. (1), 2012
- Wulandari Cahya, Wicaksono Sonny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) Khususnya Terhadap Perempuan Dan Anak : Suatu Permasalahan Dan Penanganannya Di Kota Semarang”. *Yustisia* Edisi 90 September – Desember, 2014.

C. Internet

- Antara News, LSM Laporkan Dugaan Perdagangan Orang Terhadap 17 Anak dari Sumba NTT, <https://www.antaranews.com/berita/3200413/lsm-laporkan-dugaan-perdagangan-orang-terhadap-17-anak-dari-sumba-ntt> , Diakses 15 Mei 2023.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur ”Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Menurut Kabupaten/Kota (Unit)” , diakses pada <https://ntt.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzE5IzI=/jumlah-perusahaan-industri-besar-dan-sedang-menurut-kabupaten-kota.html>, tanggal 10 juni 2025.
- Edi Suharto, ”*Permasalahan Pekerja Migran : Perspektif Pekerjaan Sosial*”. <http://www.policy.hu/suharto/maklndo.html>;, 19 Januari 2024
- Pemerintah Kabupaten Sumba Barat <https://sumbaratkab.go.id/sejarah/> , diakses pada tanggal 10 Februari 2024

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat, <https://sumbabaratkab.go.id/kondisi-geografis/> , diakses pada tanggal 10 Februari 2024

Website Berita Satu TV, https://www.youtube.com/watch?v=Ycp_7rptm7c&ab_channel=BeritaSatu , diakses pada 15 Mei 2023.

Website Kepolisian Republik Indonesia, <https://polri.go.id/visimisi>, Diakses tanggal 19 Desember 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209a.

Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UN Protocol to Prevent, Surpress and Punish Traficcking in Persons, especially Women and Children 2000 (Palermo Protocol).

United Nation Covention Against Transnasional Organized Crime 2000 (UNTOC)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak

Peraturan Provinsi NTT No. 14 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Peraturan Daerah Provinsi NTT No.1 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak

Perda Kab. SBD No 3 Tahun 2019 Tentsng Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Perda Kab.SBD No. 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak dari Berbagai Bentuk Kekerasan dan Perdagangan

Perbup No. 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan upkd Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Di Lingkungan DP3AP2KB.

INDEKS ISTILAH

- Ancaman Kekerasan halaman 76 dan 78
- Aparat Penegak Hukum halaman 8, 15, 23, 31, 32, 71, 75, 82, 107
- Eksplorasi halaman 2, 3, 6, 7, 19, 20, 22, 50, 60, 71, 77, 79
- Gugus Tugas TPPO halaman 73 dan 107
- Hak Asasi Manusia (HAM) halaman 1, 3, 5, 17, 18, 20, 40.
- Keterangan Ahli halaman 80.
- Keterangan Saksi Korban halaman 15.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) halaman 7
- Modus Operandi halaman 33.
- Penelitian Kualitatif halaman 38, 39, 46.
- Perbudakan Modern halaman 3 dan 51
- Reintegrasi Sosial halaman 85
- Rumah Aman (Shelter) halaman 44 dan 75
- Sistem Peradilan Pidana halaman 4, 17, 75

INDEKS SUBYEK

A

Arief Barda halaman 75

E

Effendi Jonaedi halaman 35

F

Farhana halaman 21

H

Hadjon Phillipus M halaman 33

Henny Nureaeny halaman 19

Howard Zehr halaman 82

K

Kerlinger halaman 41

L

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra halaman 32

M

Maria SW. Sumardjono halaman 44

Moh. Hatta halaman 33

Moh. Hatta halaman 4

Muhaimin halaman 37

R

Riyadi Prasitejo halaman 35

S

Soerjono Soekanto halaman 31

Soerjono Soekanto halaman 31

Soetandyo Wignjosoebroto halaman 36

Sudikno Mertokusumo halaman 31

GLOSARIUM

Dolmatigheid adalah daya guna, kemanfaatan, kegunaan, mandat dan tujuan; *behalve de rechtmatigheid moet ook de in aanmerking worden genomen* selain pertimbangan yuridis, pertimbangan manfaat dan tujuan

Hukum Acara Pidana (KUHP): Peran dan relevansi KUHP dalam proses peradilan TPPO.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapapun

Alat Bukti dalam TPPO merujuk pada jenis bukti yang sah dan relevan (keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, bukti elektronik)

Modus Operandi TPPO adalah Cara-cara yang digunakan pelaku dalam merekrut, mengangkut, menampung, dan mengeksploitasi korban.

Penanganan Korban TPPO: Proses penyelamatan, rehabilitasi, dan perlindungan bagi korban.

Pencegahan TPPO adalah Strategi dan program untuk mencegah terjadinya TPPO (edukasi, sosialisasi, peningkatan kesadaran masyarakat).

Penegakan Hukum TPPO adalah Proses implementasi hukum oleh aparat berwenang, termasuk penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

Peran Lintas Sektor adalah kolaborasi antara berbagai instansi pemerintah (Polres, Dinas Sosial, DP5A, Dinas Ketenagakerjaan) dan non-pemerintah (LSM, organisasi masyarakat sipil) dalam upaya anti-TPPO.

Rumah Aman (Shelter) adalah Fasilitas dan layanan yang disediakan untuk penampungan dan pemulihan korban.

Keterangan Ahli keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang suatu hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana, baik dalam tahap penyidikan maupun persidangan

Eksplotasi adalah pemanfaatan sesuatu secara berlebihan atau tidak adil untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu, seringkali tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan.